

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pembangunan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah.

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, hal ini tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Salah satunya diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah, salah satu adalah belanja modal.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah seperti, Pelaksanaan Otonomi berdasarkan pada luas, nyata, bertanggung

jawab, dinamis, dan pelaksanaan otonomi yang luas yang utuh diletakan pada daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan daerah berarti memampukan daerah untuk mengelolah sumberdaya yang dimiliki guna memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan kemandirian ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah demi meningkatkan PAD. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Sumber-sumber penerimaan daerah Otonomi daerah dalam konteks Otonomi dan desentralisasi saat ini masih didominasi oleh bantuan pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil.

Pemberian Otonomi luas pada daerah diarahkan untum mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyiarkat melalui peningkatan peningkatan pelayanan, pemberdaya dan peran serta masyiatrakat. Dalam menjalankan Otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan dkeadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam rangka meningkatkan efensiesi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Daerah dan masyarakat swasta merupakan salah satu pelakupokok dan terpenting dalam pembangunan

perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah di beri hak Otonomi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Daerah.

Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sebagai bagian dari daerah otonomi sudah seharusnya memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dan dalam pelaksanaan Otonomi itu sendiri. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menjadi tolak ukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi kebutuhan belanja daerah khususnya belanja modal yang dapat di biayai dari PAD, maka akan semakin baik kualitas otonomi daerah tersebut. Selain sumber daerah PAD. Pendapatan suatu daerah juga bersumber dari dana perimbangan.

Dana perimbangan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai belanja daerah dari dana perimbangan dengan porsi yang lebih besar dibandingkan PAD, mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum dapat dikatakan mandiri karena masih bergantung pada pemerintah pusat. Inilah alasan mengapa PAD dan dana perimbangan menjadi hal yang paling disoroti dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini pemerintah daerah terlalu menggantungkan pada alokasi DAU untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar dapat periode berikutnya DAU di peroleh tetap.

Menurut Ndadari dan Adi (2008) dalam Amalia 2014 proposi DAU terhadap penerimaan daerah daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kencoro (2004) dalam Amelia (2014) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan ini yang menimbulkan perilaku asimetri pada Pemerintah Daerah.

Keadaan ketergantungan ini dan proporsi PAD terhadap total pendapatan, tentunya berdampak pada perkembangan pembangunan di NTT lebih khusus pada Kabupaten Flores Timur. Dalam pembangunan daerah satu kekuasaan diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membangun daerah masing-masing sehingga masyarakat di daerah itu sejahtera, tentram dan damai.

Pembangunan daerah di berikan kepada pemerintah daerah dalam upaya otonomi daerah khususnya di sektor ekonomi pemberian hak otonomi di maksud untuk memberikan keluasaan bagi pemerintah daerah agar dapat menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam atau menggali potensi-potensi daerah tersebut guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Mahmudi (2010:52) Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengolahan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen.

Kemandirian daerah tersebut dapat terlaksana apabila pemerintah daerah menggunakan kewenangannya. Kewenangan yang begitu luas akan membawa

konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya. Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, pengadilan dan agama. Atas dasar kewenangan tersebut pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk mengalirkan segala potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 -2018

(dalam Rupiah)

TAHUN	ANGGARAN	RELISASI	PERSEN (%)
2014	42,194,313,000.00	44,528,326,885.99	105.53
2015	52,031,820,000.00	47,561,063,030.01	91.41
2016	53,825,738,100.00	50,183,797,225.36	93.23
2017	90,212,914,900.00	57,525,204,745.80	63.77
2018	63,726,544,400.00	55,589,470,428.40	87.23

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) KAB. FLORES TIMUR

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Realisasi Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dari tahun 2014-2018 telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebagian besar perolehan Pendapatan Asli Daerah di atas target penerimaan setiap Tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian

realisasi penerimaan dari PAD yang diperoleh, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat kab. Flores Timur terus mengalami trend pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dinamika Ekonomi Kabupaten Flores Timur yang terus bergerak maju ini ditopang oleh iklim investasi di sektor pariwisata dan ekonomi bisnis perkotaan semakin maju. Investasi di sektor pariwisata ikut memberi andil yang luar biasa dalam pencapaian pendapatan asli daerah pemerintahan Kabupaten Flores Timur setiap tahun.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Flores Timur, untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur secara Keseluruhan. Guna mengetahui potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014-2018”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti di antaranya yakni :

1. Bagaimana Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan sumbernya di Kabupaten Flores Timur ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Potensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan sumbernya di Kabupaten Flores Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan sumbernya di Kabupaten Flores Timur
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung Potensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan sumbernya di Kabupaten Flores Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan selalu memberi manfaat bagi berbagai pihak, yakni :

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mengetahui Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur.
2. Bagi pihak lain penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Menambah ilmu dan wawasan penulis tentang Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Kabupaten Flores Timur. serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira.